
Dampak Korupsi terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Rizki Khairani Hasibuan*

STIE Indonesia Banking School
rizki.20231111034@ibs.ac.id

Amelia Putri Indah Cahyani

STIE Indonesia Banking School
amelia.20231111042@ibs.ac.id

Melliani Septiawati

STIE Indonesia Banking School
melliani.20231111037@ibs.ac.id

Astriani Puspita Maharani

STIE Indonesia Banking School
astriani.20231111043@ibs.ac.id

Aulia Biea Bellia

STIE Indonesia Banking School
aulia.20231111038@ibs.ac.id

Diterima 19 Maret 2025; Disetujui 12 Desember 2025; Dipublikasikan 25 Desember 2025

Abstract

Corruption hinders economic growth, reduces investor confidence, and exacerbates social injustice. Key contributing factors include economic pressure, greed, and weak oversight. This study evaluates the impact of corruption on Indonesia's inflation and economic growth 2019-2024 using secondary data from Statistics Indonesia (BPS), Transparency International, World Bank, and Bank Indonesia. The results show that high levels of corruption contribute to economic instability. Policy reforms, transparency, and strict law enforcement are needed to improve CPI scores, curb inflation, and promote sustainable economic growth. Corruption increases inflation, discourages investment, and weakens the economy.

Keywords

corruption, inflation, economic growth

Abstrak

Korupsi menghalangi pertumbuhan ekonomi, mengurangi kepercayaan dari investor, dan memperburuk ketidakadilan sosial. Faktor-faktor utama yang menjadi penyebabnya termasuk tekanan ekonomi, keserakahan, dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini mengevaluasi dampak korupsi terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019-2024 dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), *Transparency International*, *World Bank*, dan Bank Indonesia. Hasilnya memperlihatkan bahwa tingginya tingkat korupsi berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi. Reformasi kebijakan, transparansi, dan penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk meningkatkan skor CPI, menekan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Korupsi meningkatkan inflasi, menghambat investasi, dan melemahkan ekonomi.

Kata Kunci

korupsi, inflasi, pertumbuhan ekonomi

*) Corresponding Author

Pendahuluan

Di Indonesia, korupsi telah berlangsung sejak masa kerajaan, kolonialisme, hingga era modern saat ini. Tidak hanya terjadi di Indonesia, korupsi juga masih menjadi persoalan di negara maju seperti Amerika Serikat (Mohamad Tohari, 2022). Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dari pemerintah, maka perlunya peran pengawasan dalam pemberantasan korupsi. (Taufik Effendi, 2006) dalam Jurnal Hukum dan HAM bidang pendidikan yang berjudul “Menjalin Sinergi antara Lembaga Pengawasan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi” menyatakan bahwa pengawasan dapat berperan sebagai berikut:

1. Memperkecil kesempatan (opportunities) terjadinya korupsi, upaya ini lebih bersifat mencegah (preventive).
2. Membantu pengungkapan (exposure) kasus korupsi melalui audit yang diikuti tindak lanjut, upaya ini lebih mengarah pada penindakan (repressive).

Korupsi sering kali muncul akibat tekanan untuk mempercepat pembangunan, sementara birokrasi yang lambat menciptakan celah bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan melalui suap. Jika tidak ada regulasi yang ketat serta kesadaran masyarakat yang tinggi, korupsi ini akan terus berlanjut. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi langkah penting dalam upaya mencapai kestabilan pada pertumbuhan ekonomi, tanpa bergantung pada sudut pandang individu mengenai isu korupsi ini (Hartini, 2023).

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang merusak struktur ekonomi dan merongrong kohesi sosial di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampak ekonomi korupsi meliputi penggerusan anggaran publik melalui kebocoran dana, proyek fiktif, dan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Penelitian Bank Dunia (2021) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi tinggi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi rata-rata 1,5% per tahun.

Di Indonesia, korupsi berdampak signifikan terhadap sektor infrastruktur, dengan kerugian mencapai Rp 51 triliun pada tahun 2023 (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023). Dampak sosial korupsi juga mencakup perburukan ketidakadilan, memfasilitasi akumulasi kekayaan di kalangan elite, sementara kelompok rentan semakin terpinggirkan. Laporan Transparency

International (2022) menunjukkan bahwa Indonesia mendapatkan skor 34/100 dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang berpotensi berdampak negatif terhadap masyarakat miskin di Indonesia.

Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, 2023) mengungkapkan bahwa 68% responden tidak percaya pada transparansi kebijakan publik. Dampak korupsi juga tercermin dalam biaya transaksi bisnis yang meningkat, menghambat perkembangan UMKM. Penelitian oleh Mauro (1995) membuktikan bahwa korupsi meningkatkan biaya transaksi bisnis hingga 20%.

Korupsi berdampak pada kesenjangan terhadap gender, terutama bagi perempuan di daerah pedesaan yang menghadapi keterbatasan akses terhadap program perlindungan sosial. Studi yang dilakukan oleh Ullman (2022) menekankan pentingnya dalam hal untuk mempertimbangkan aspek gender dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi guna mengurangi dampak negatifnya terhadap kelompok rentan.

Menurut Puji Astuti (2013), korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari individu itu sendiri / internal maupun dari pengaruh lingkungan sekitar / eksternal.

Faktor internal korupsi mencakup dua aspek utama. Pertama, adanya dorongan kebutuhan (corruption by needs), kondisi ini biasanya terjadi karena penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga atau biaya hidup yang tinggi. Kedua, dorongan ketamakan (corruption by greeds), korupsi dilakukan semata-mata demi memenuhi ambisi pribadi, seperti kepemilikan barang-barang mewah, status sosial yang lebih tinggi, atau untuk mempertahankan pola hidup yang boros.

Menurut studi Alpiani M.dkk (2024), faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku korupsi dapat dilihat dari berbagai aspek, terutama aspek ekonomi dan organisasi. Dari sisi ekonomi, pendapatan yang dianggap tidak mencukupi seringkali menjadi pemicu utama, terutama jika individu memiliki gaya hidup konsumtif yang tidak seimbang dengan penghasilannya.

Di sisi lain, dari perspektif organisasi atau perusahaan, sejumlah kelemahan dalam sistem manajemen dan pengawasan turut berperan dalam mendorong praktik korupsi. Ketidakadaan sistem akuntabilitas yang transparan, lemahnya pengelolaan organisasi, serta tidak adanya budaya kerja yang mengedepankan integritas menciptakan lingkungan yang toleran terhadap perilaku korupsi. Selain itu, minimnya pengawasan yang efektif serta kurangnya ketegasan dan keteladanan dari para pemimpin dalam menegakkan aturan dan prinsip antikorupsi semakin memperburuk situasi.

Tindakan korupsi tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga membawa dampak serius terhadap kestabilan ekonomi. Korupsi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kepercayaan investor, dan memperburuk ketimpangan sosial, yang pada akhirnya mengganggu keseimbangan ekonomi negara. Sebuah penelitian oleh Raldin Alif Hazmi (2023) menunjukkan bahwa korupsi berkaitan erat dengan lemahnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, berkontribusi terhadap penurunan kualitas perkembangan ekonomi. Ridho Irawan (2022) dalam studinya, mengemukakan bahwa korupsi di Indonesia memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kestabilan makroekonomi. Bahkan, mereka menekankan bahwa korupsi seringkali memicu ketidaksetaraan sosial yang memperburuk ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat.

Landasan Literatur

Pengertian Korupsi, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi

Korupsi memberikan dampak buruk yang meluas di berbagai bidang kehidupan, baik dalam lingkup nasional maupun global, terutama dalam sektor ekonomi yang berperan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan aset, dana, atau wewenang yang dimiliki oleh negara, perusahaan, organisasi, yayasan, atau entitas lainnya untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain yang tidak berhak. UU No.31 Tahun 1999 menyebutkan korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan melanggar hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi, menguntungkan orang lain, atau suatu korporasi, yang pada akhirnya merugikan keuangan atau perekonomian negara. Menurut Agus Mulya Karsona (2011) Korupsi adalah tindakan yang tidak etis, merugikan, dan merusak, terutama dalam lingkup jabatan di instansi atau aparatur pemerintahan. Praktik ini mencakup penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, penyimpangan kekuasaan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik, serta pengangkatan keluarga atau kelompok tertentu dalam jabatan pemerintahan secara tidak adil.

Menurut Bank Indonesia, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara menyeluruh yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga pada satu atau dua barang saja tidak dianggap sebagai inflasi, kecuali jika menyebabkan dampak luas yang mendorong kenaikan harga barang lainnya. Menurut Rahardja dan Manurung (2004), suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami inflasi apabila memenuhi tiga karakteristik utama, yaitu:

1. terdapat kenaikan harga,
2. kenaikan harga terjadi secara luas, dan
3. berlangsung secara terus-menerus.

Menurut Sadono Sukirno (2010), pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan aktivitas dalam perekonomian yang mendorong bertambahnya produksi barang dan jasa, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi guna menambah output, yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah (Rahardjo, 2013).

Tingkat Inflasi

Dapat dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang mengukur perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang biasa dikonsumsi oleh rumah tangga. Perubahan harga ini dibandingkan dengan harga di periode sebelumnya untuk mendapatkan tingkat inflasi yang pada gilirannya mempengaruhi daya beli uang. Rumus perhitungan inflasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{IHK lama} - \text{IHK terbaru}}{\text{IHK terbaru}} \times 100\%$$

Dimana:

- **IHK lama:** Indeks Harga Konsumen pada periode sebelumnya.
- **IHK terbaru:** Indeks Harga Konsumen pada periode saat ini.

Berikut adalah penggolongan inflasi berdasarkan kriteria kenaikan harga barang, seperti yang dikemukakan oleh Riyono dkk. (2022) Inflasi dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Inflasi ringan: terjadi ketika harga barang naik kurang dari 10% per tahun. Ini menunjukkan bahwa inflasi masih dalam tingkat yang terkendali.
2. Inflasi sedang: terjadi ketika harga barang naik antara 10% hingga 30% per tahun. Pada tingkat ini, inflasi mulai mempengaruhi daya beli masyarakat.
3. Inflasi tinggi: terjadi ketika harga barang naik antara 30% hingga 100% per tahun. Inflasi pada tingkat ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi.
4. Hiperinflasi: terjadi ketika harga barang naik lebih dari 100% per tahun. Pada tingkat ini, inflasi dapat menyebabkan keruntuhan sistem ekonomi.

Teori - Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi. Berikut beberapa teori pertumbuhan ekonomi dan menurut ahlinya:

1. Teori Klasik

Teori ini dikembangkan oleh Adam Smith, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh peningkatan populasi. Semakin banyak penduduk, semakin banyak tenaga kerja yang tersedia, sehingga output dan hasil produksi juga meningkat. Namun, teori ini juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menurun seiring dengan bertambahnya jumlah populasi dan sumber daya yang semakin terbatas.

2. Teori Neo Klasik

Teori ini dikembangkan oleh Robert M. Solow, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh tiga faktor, yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Teori ini berfokus pada proses produksi dan bagaimana sumber daya digunakan untuk meningkatkan output. Menurut Solow, pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan negatif, tergantung pada bagaimana sumber daya tersebut digunakan.

3. Teori Historis

Teori ini dikembangkan oleh Friedrich List, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh teknik produksi dan perkembangan ekonomi sepanjang sejarah. Teori ini berfokus pada bagaimana suatu negara berkembang dari masa prasejarah hingga industri modern, dan bagaimana teknik produksi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut List, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari tahapan perkembangan ekonomi, mulai dari masa berburu, beternak, bertani, kerajinan, hingga industri perdagangan.

Biaya Transaksi dalam Praktik Korupsi

Teori biaya transaksi menjelaskan bahwa biaya yang dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana praktik korupsi dapat meningkatkan biaya transaksi dan mengurangi efisiensi ekonomi. Berikut beberapa cara korupsi dapat meningkatkan biaya transaksi

1. Biaya suap: Korupsi sering kali memaksa perusahaan atau individu untuk membayar suap demi memperoleh izin, kontrak, atau layanan publik.

2. Biaya waktu: Korupsi dapat memperlambat proses transaksi karena dibutuhkan waktu untuk bernegosiasi, membayar suap, atau menunggu keputusan.
3. Biaya risiko: Korupsi dapat meningkatkan risiko dalam transaksi, karena tidak ada kepastian bahwa transaksi akan berjalan lancar.
4. Biaya oportunistik: Praktik korupsi dapat membuat perusahaan atau individu kehilangan peluang karena terbatasnya sumber daya dan tingginya biaya transaksi.

Kesimpulan apabila korupsi dilakukan dalam jangka panjang, maka dapat menurunkan efisiensi ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem yang transparan dan akuntabel guna mengurangi praktik korupsi serta biaya transaksi.

Kutipan dari Penelitian Sebelumnya

Korupsi memiliki dampak negatif yang meluas di berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat nasional maupun internasional, khususnya dalam sektor ekonomi yang sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartini dkk. (2023) bahwa korupsi menjadi salah satu faktor yang menghambat serta melemahkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sekaligus merusak keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Dan diperkuat juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristia Ningsih dkk. yang mengindikasikan bahwa variabel Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi memiliki dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada setiap peningkatan satu angka dalam indeks tersebut berkontribusi pada kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1.579 yang menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia semakin terkendali. Dalam kondisi ini, pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal untuk aktivitas yang lebih produktif dan menciptakan efek berantai (multiplier effect) yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, korupsi juga memberikan efek negatif yang mendalam terhadap ketimpangan sosial di Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Dicky Hermawan dkk. (2024) Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang lambat serta ketimpangan sosial, merupakan dampak dari korupsi bagi pembangunan infrastruktur. Korupsi berkontribusi pada lemahnya investasi, rendahnya produktivitas, menurunnya kualitas produk dan jasa, berkurangnya penerimaan pajak, serta meningkatnya utang negara. Selain itu, praktik korupsi juga membatasi akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap sumber daya ekonomi, keuangan, kesehatan, pendidikan, informasi, hukum, dan aspek sosial lainnya, yang pada akhirnya memperburuk kemiskinan. Dalam konteks ini, korupsi menjadi faktor utama yang memperparah marginalisasi kelompok miskin di Indonesia.

Penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa korupsi memiliki dampak merugikan terhadap perekonomian. Amoh, Awuah-Werekoh, dan Boateng (2022) menemukan bahwa hampir semua bentuk korupsi, kecuali pengalihan dana publik, berdampak negatif dan signifikan terhadap berbagai indikator pertumbuhan ekonomi. Selain itu, korupsi yang merajalela di berbagai sektor turut menciptakan ketidakstabilan ekonomi, melemahkan efektivitas kebijakan ekonomi, dan menjadi hambatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam berbagai penelitian sebelumnya, hubungan antara korupsi, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi topik yang banyak dikaji. Salah satu studi yang relevan membahas bagaimana inflasi dan korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di ASEAN, sebagaimana dikutip berikut ini Darwin & Marta (2023), korupsi dan inflasi di ASEAN ketika dianalisis secara simultan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka untuk mengetahui bagaimana korupsi berdampak pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data yang digunakan dalam kajian ini diperoleh dari data sekunder yang didapat melalui studi pustaka, meliputi berbagai referensi akademik seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Untuk mendukung penelitian, data yang digunakan diperoleh dari berbagai lembaga resmi, seperti Badan

Pusat Statistik (BPS), *Transparency International*, *World Bank*, dan Bank Indonesia. Data dari sumber-sumber tersebut dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta untuk mendukung validitas temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Korupsi

Transparency International mengeluarkan *Corruption Perceptions Index* (CPI) setiap tahun sebagai indikator utama untuk menilai tingkat korupsi di negara-negara yang berbeda. CPI ditentukan berdasarkan pandangan para ahli dan pelaku bisnis mengenai sektor publik, dengan skala 0 hingga 100 dalam hal ini skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah. Di samping itu, peringkat korupsi mencerminkan posisi suatu negara dalam perbandingan dengan negara lain dalam indeks global. Peringkat yang semakin tinggi menunjukkan kondisi yang semakin buruk dibandingkan dengan negara-negara lain.

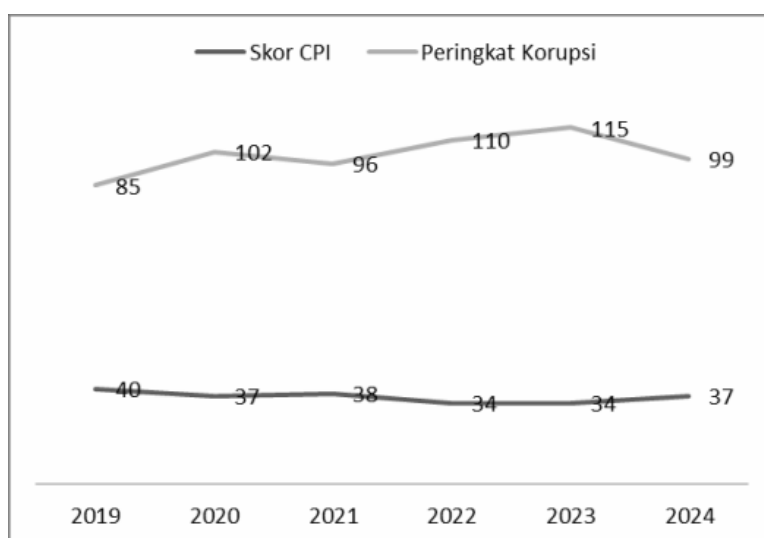
Skor CPI mengalami variasi dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, skor CPI tercatat di angka 40, lalu mengalami sedikit perubahan di tahun-tahun berikutnya dan mencapai angka 37 pada 2024. Di sisi lain, peringkat korupsi menunjukkan pola yang lebih beragam. Pada 2019, Indonesia berada di peringkat 85, kemudian meningkat menjadi 102 pada 2020, turun ke 96 pada 2021, kemudian kembali meningkat hingga mencapai angka tertinggi di 115 pada 2023 sebelum turun ke 99 pada 2024.

Tren ini menunjukkan bahwa skor CPI cenderung stabil, peringkat korupsi mengalami variasi yang cukup penting, terutama pada periode 2020-2023. Kenaikan peringkat (yang berarti posisi yang lebih buruk) dapat mengindikasikan bahwa negara lain telah melakukan perbaikan dalam upaya antikorupsi dengan lebih cepat dibandingkan negara ini. Sementara itu, penurunan peringkat pada 2024 dapat menunjukkan adanya langkah-langkah reformasi yang mulai menunjukkan hasil.

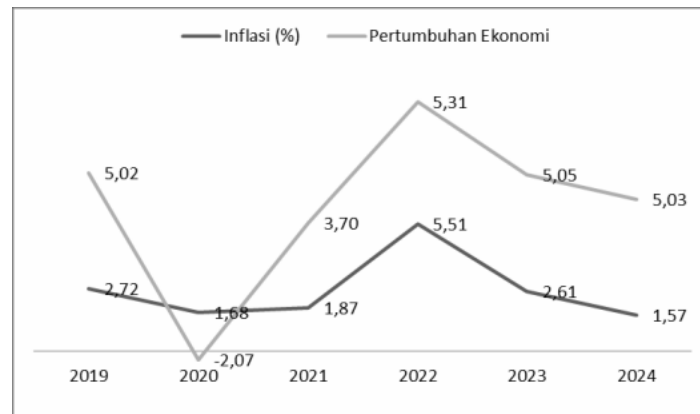
Dari informasi ini, dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan skor CPI tidak selalu berkorelasi dengan perbaikan peringkat korupsi, sebab peringkat tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi global serta perbandingan dengan negara lainnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan skor CPI dan peringkat korupsi secara berkesinambungan, diperlukan langkah-langkah nyata dalam reformasi kebijakan, peningkatan transparansi, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap kasus-kasus korupsi.

Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah dua indikator penting ketika menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Kedua faktor ini memiliki relasi yang kompleks, di mana inflasi yang sangat tinggi bisa menekan daya beli masyarakat, sedangkan inflasi yang terjaga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar 1. Perbandingan Skor CPI dan Peringkat Korupsi
Sumber: Data *Transparency Internasional* 2019-2024 (diolah)

**Gambar 2.** Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (diolah)

Inflasi yang tinggi, seperti yang terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,51%, mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara cepat. Hal ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti peningkatan permintaan sebagai akibat dari pemulihan ekonomi, gangguan pada rantai pasokan global, atau peningkatan harga komoditas dunia. Inflasi yang tinggi berisiko mengurangi daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi bagi pelaku usaha, yang apabila tidak dikelola dengan baik, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, inflasi yang sangat rendah atau bahkan deflasi, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2020 sebesar -2,07%, sering kali menunjukkan lemahnya permintaan di pasar. Dalam keadaan ini, harga barang dan jasa cenderung turun, yang dapat mendorong produsen untuk mengurangi produksi dan investasi. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi melambat, tenaga kerja berisiko kehilangan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat menurun. Hal ini sejalan dengan situasi pada tahun 2020, di mana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga -2,07%, sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang memperlambat aktivitas ekonomi serta menurunkan konsumsi dan investasi.

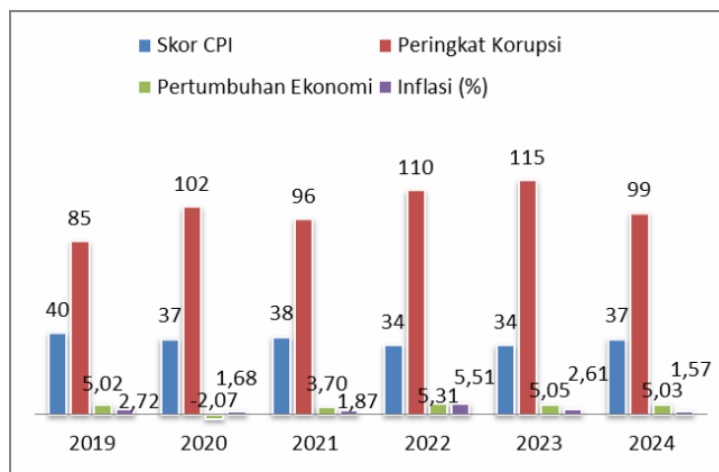
Namun, setelah mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan perbaikan pada tahun 2021 sebesar 3,70% dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 5,31%. Pemulihan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi pasca-pandemi, didorong oleh stimulus fiskal, kebijakan moneter yang akomodatif, serta peningkatan mobilitas masyarakat dan investasi.

Meskipun pertumbuhan ekonomi tetap positif pada tahun 2023 sebesar 5,05% dan tahun 2024 sebesar 5,03%, terdapat sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat dihubungkan dengan kebijakan moneter yang lebih ketat untuk mengendalikan inflasi, melemahnya permintaan global, serta faktor struktural seperti ketimpangan produktivitas dan ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan utama dalam memastikan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Korupsi Memengaruhi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Korupsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi skor korupsi, seperti yang terjadi pada tahun 2023 yang mencatat peringkat 115, mengindikasikan bahwa tingkat korupsi semakin parah. Situasi ini dapat menghambat investasi, mengurangi efektivitas pengeluaran pemerintah, serta menurunkan produktivitas ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat terlihat pada tahun 2020, saat peringkat korupsi naik menjadi 102, sementara pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -2,07%. Meskipun perlambatan ekonomi tersebut juga dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, tingkat korupsi yang tinggi dapat memperparah dampaknya dengan mengurangi efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi. Di sisi lain, pada tahun 2022, meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31%, peringkat korupsi juga memburuk menjadi 110. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi tetap tumbuh, tingginya tingkat korupsi dapat menghalangi



Gambar 3. Skor CPI, Peringkat Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi Indonesia (2019-2024)

Sumber: *World Bank*, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan *Transparency Internasional* (diolah)

pertumbuhan lebih lanjut dengan meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan mengurangi kepercayaan investor.

Sementara itu, inflasi juga terpengaruh oleh tingginya tingkat korupsi. Pada tahun 2022, ketika peringkat korupsi memburuk menjadi 110, inflasi melonjak mencapai 5,51%. Korupsi dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran negara, meningkatkan biaya produksi akibat praktik suap, serta menciptakan distorsi dalam distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga-harga.

Namun, ketika peringkat korupsi mulai membaik pada tahun 2024 dengan nilai 99 dan skor CPI naik menjadi 37, inflasi turun menjadi 1,57%. Perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan pengurangan tingkat korupsi berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dengan meredakan tekanan inflasi serta meningkatkan kepercayaan investor.

Dampak Korupsi pada Sektor-sektor di Indonesia

Dalam sektor kesehatan, kasus korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp319 miliar. Tiga tersangka, yaitu BS (PPK Kementerian Kesehatan), AT (Direktur Utama PT PPM), dan SW (Direktur Utama PT EKI), terlibat dalam praktik korupsi yang mencakup pembayaran tanpa kontrak sah dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Audit oleh BPKP mengungkapkan pemborosan dana publik yang seharusnya digunakan untuk sektor kesehatan dalam menghadapi pandemi. Korupsi ini menyebabkan inefisiensi alokasi anggaran, menurunkan kualitas layanan publik, serta memperlambat pemulihan ekonomi negara, terutama dalam krisis seperti pandemi COVID-19. (sumber kpk.go.id)

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), korupsi di sektor pendidikan antara 2016–2021 menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,6 triliun dengan 240 kasus yang ditindak. Salah satu modus yang sering ditemukan adalah suap dalam penerimaan mahasiswa jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN), dengan tarif suap antara Rp100 juta hingga Rp350 juta. Meskipun jalur mandiri diatur untuk memberi fleksibilitas seleksi, kebijakan ini membuka peluang bagi praktik koruptif, seperti yang terjadi di Universitas Negeri Lampung (UNILA) pada 2022, di mana KPK menangkap Rektor UNILA dan tujuh orang lainnya terkait suap mencapai Rp5 miliar. Praktik ini mencerminkan maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan pendidikan, yang mengurangi kualitas sumber daya manusia dan menciptakan ketidakadilan akses pendidikan. Akibatnya, hal ini memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi serta menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. (Ombudsman RI)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka terkait dugaan korupsi dalam pengadaan dan pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung TA 2020–2023. Tersangka tersebut adalah ES (Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD), serta RI, AH, dan FCR (anggota DPRD). Kasus ini bermula dari pembahasan APBD Perubahan Kota Bandung 2022, di mana disepakati anggaran untuk Program Bandung Smart City di Dinas Perhubungan. ES diduga menerima gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan memfasilitasi

penambahan anggaran untuk kepentingan anggota DPRD. Sementara itu, RI, AH, dan FCR diduga menerima gratifikasi dan proyek dari Dinas Perhubungan. Total penerimaan uang oleh ES diperkirakan mencapai Rp1 miliar, dengan jumlah yang serupa diterima oleh anggota DPRD. Keempat tersangka disangkakan melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dampak kasus ini adalah terhambatnya alokasi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ekonomi, menyebabkan pemborosan anggaran yang seharusnya memperbaiki infrastruktur dan layanan publik. Korupsi dalam pengelolaan APBD mengurangi efisiensi keuangan daerah, memperburuk kesenjangan sosial, dan memperlambat kemajuan ekonomi lokal. Kasus ini juga dapat menurunkan kepercayaan investor domestik dan asing, mengurangi potensi investasi dan menghambat pembangunan ekonomi yang inklusif. Dalam jangka panjang, dampaknya dapat memperburuk ketidakadilan ekonomi, menghambat penciptaan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang transparan dan efisien, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. (sumbernya kpk.go.id)

Perbandingan dampak korupsi di negara berkembang vs negara maju

Negara berkembang menurut Michael Todaro adalah negara berkembang yang memiliki pendapatan per kapita yang relatif rendah, dengan ketergantungan yang besar terhadap sektor pertanian dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Negara berkembang umumnya menghadapi masalah seperti distribusi pendapatan yang tidak merata, tingkat pendidikan yang lebih rendah, dan kurangnya infrastruktur yang memadai.

Berbanding terbalik dengan negara maju, korupsi dapat memberikan dampak negatif dari berbagai bidang di negara berkembang. Contohnya dengan meningkatnya jumlah korupsi dapat mengurangi investasi asing dan domestik, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan terjadinya kemiskinan yang meningkat, serta memicu kerusuhan sosial dan politik sampai mengancam kestabilan negara. Keterbatasan akses masyarakat ke layanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Negara maju menurut Amartya Sen adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi, diukur dari faktor-faktor seperti pendidikan, kesehatan, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan sosial.

Di negara maju tingkat kesejahteraan sosialnya sangat tinggi sehingga mendapatkan pengaruh bagi faktor atau sektor bidang lainnya. Seperti korupsi dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, selain itu juga mengurangi efisiensi ekonomi dan meningkatkan biaya transaksi. Korupsi dapat mengancam demokrasi dan mengurangi kemampuan negara untuk menjaga kebebasan dan hak asasi manusia. Korupsi di negara maju juga merusak reputasi bagi negara tersebut karena mengurangi kemampuan negara untuk menarik investasi asing.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa korupsi memberikan dampak yang signifikan terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tingginya tingkat korupsi, seperti yang ditunjukkan oleh Indeks Persepsi Korupsi (CPI), memiliki keterkaitan dengan ketidakstabilan ekonomi, yang tercermin dalam peningkatan inflasi, melambatnya pertumbuhan ekonomi, serta menurunnya kepercayaan investor. Korupsi menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran negara, defisit fiskal, dan meningkatnya biaya transaksi ekonomi, yang pada akhirnya menghambat pembangunan nasional.

Dampak korupsi terlihat jelas dalam berbagai sektor strategis. Dalam sektor kesehatan, praktik korupsi dalam pengadaan alat medis tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga mengurangi kualitas layanan kesehatan. Di sektor pendidikan, suap dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa memperburuk ketimpangan sosial dan menurunkan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, di sektor infrastruktur, korupsi berkontribusi terhadap pembengkakan biaya proyek, keterlambatan pembangunan, serta penurunan daya tarik investasi asing.

Perbandingan antara negara berkembang dan negara maju menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi rendah memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik, ditandai dengan inflasi yang terkendali dan

pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang kuat, transparansi pemerintahan, serta kebijakan ekonomi yang efektif merupakan faktor kunci dalam menekan tingkat korupsi dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara.

Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui reformasi kebijakan, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti e-government dan blockchain dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi peluang korupsi dalam tata kelola pemerintahan. Dengan menekan praktik korupsi, Indonesia dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, meningkatkan investasi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agung Nusantara, (2008). Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi.
- Alpiani Miulyadi, Pipit Sunarti, Dewi Asri Puanandini, S.H., M.H. (2024) Pengaruh Korupsi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Hukum.
- Alvena Adhina Putri, Achmad Athariq Aryazeta, Zainal Fu'ad, Ismikarimah, Yulistia Devi, Erlin Kurniati (2024) "Teori-teori Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi.
- Amoh, J. K., Awuah-Werekoh, K., & Boateng, K. O. (2022). Apakah kegiatan Korupsi Menghambat Pertumbuhan Ekonomi? Bukti Empiris Dari Ekonomi Berkembang. Jurnal Kejahatan Keuangan, 29(3), 1114-1130. <https://doi.org/10.1108/Jfc-11-2019-0150>
- Aroma Elmina Martha, Dwi Hastuti (2013). Gender dan Korupsi (Pengaruh Kesetaraan Gender DPRD dalam Pemberantasan Korupsi di Kota Yogyakarta)
- Darwin Damanik & Marta Saragih. (2023) Korupsi, Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Asean
- Dicky Hermawan, Agung Putra Fatullah, Cayadi, Ahmad Hidayat, Zainab Ompu Jainah. (2024) Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur di Negara Berkembang
- Florentinus Sudiran (2017) Jurnal LEGALITAS Volume 2 Nomor 1, Juni 2017 "Mencegah Korupsi Di Daerah Dengan Pengawasan Oleh Kejati"
- Hartini, Eka Chyntia, Fauzan (2023). Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi: Apakah Korupsi Melumasi Atau Mengamplas Roda Pembangunan di Indonesia?
- Kristia Ningsih, Whinarko Juliprijanto, (2021) Dinar Melani Hutajulu. Analisis Pengaruh Inflasi, Investasi, Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2019
- M. Hafidz Meiditambua Saefulloh, Muhammad Rizah Fahlevi, Sylvi Alfa Centauri (2023) "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Indonesia"
- Mohamad Tohari, Lamijan (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik.
- Puji Astuti, PA (2013). Politik Korupsi: Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 2 (1), 5-17. <https://doi.org/10.14710/Politika.2.1.2011.5-17>
- Rahmiati, R., Gunawan, R., Thamliha, A., & Hafiz, M. I. (2024). Dampak korupsi terhadap perekonomian di Indonesia. Jurnal Mahasiswa Hukum, 1(1), 22-29.
- Raldin Alif Al Hazmi (2023). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik
- Ridho Irawan (2022). Kajian Analisa Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akibat Korupsi Pasca Era Reformasi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS]
- Taufik Effendi, (2006). Dampak Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia.